

**FENOMENA KRISIS LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT
DI SEKITAR PABRIK GULA GEMPOLKREP MOJOKERTO
DALAM PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

DURROTUL CHABIBAH

NIM: E04213021

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

yang tak dapat dilupakan begitu saja. Dikarenakan isu lingkungan sebagai potret diri peradaban sebuah bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih menggantungkan ekonomi dan pembangunannya dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tetapi aspek yang tak kalah pentingnya ialah bagaimana sumber daya alam tersebut dimanfaatkan tanpa meninggalkan masalah lain yang dapat menjadi persoalan baru dari berbagai persoalan-persoalan sosial, budaya, ekonomi dan politik lainnya. Untuk itu isu lingkungan seyogyanya mendapatkan perhatian secara serius oleh seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada, inilah yang dimaksud sebagai titik tolak dari telaah ekologi politik.

Kegiatan industri dapat berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Kegiatan industri dapat menghasilkan limbah dari sisa hasil produksi yang dapat mencemari lingkungan. Limbah industri harus ditangani dengan tepat melalui rencana pengelolaan lingkungan sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Salah satu kegiatan industri yang mempunyai potensi limbah yang besar adalah PG (pabrik gula) Gempolkrep Mojokerto. PG Gempolkrep Mojokerto adalah salah satu pabrik gula di bawah naungan PTPN X. PG Gempolkrep mempunyai kapasitas produksi terbesar dalam lingkup perusahaan gula di PTPN X. Kapasitas produksi PG Gempolkrep yaitu sebesar 6500 ton tebu per hari. Dalam operasionalnya setiap musim giling (setahun), pabrik gula selalu mengeluarkan limbah yang berbentuk cairan, padatan dan gas. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perusahaan besar pasti memiliki dampak pada lingkungan sekitar.

Pada dasarnya setiap industri memiliki suatu kegiatan yakni mengelola suatu bahan mentah menjadi produk. Spesifikasi dan jenis limbah yang diproduksi pada sektor industri dapat diamati pada proses masukan, pengolahan maupun pada keluarannya. Pencemaran yang ditimbulkan oleh industri diakibatkan adanya limbah yang keluar dari pabrik dan mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Bahan pencemar keluar bersama-sama dengan limbah melalui media udara, air, dan tanah yang merupakan komponen ekosistem alam. Kebanyakan dampak dari limbah pabrik membahayakan, akan tetapi tidak memungkiri bahwa limbah pabrik dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu produk juga.

Pencemaran terjadi akibat limbah beracun dan berbahaya masuk ke dalam lingkungan sehingga terjadi perubahan terhadap kualitas lingkungan. Lingkungan sebagai wadah penerima akan menyerap bahan limbah tersebut sesuai dengan kemampuan asimilasinya, dimana wadah penerima berupa air, udara, dan tanah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda, misalnya air pada suatu saat dan tempat tertentu akan berbeda karakteristiknya dengan air pada tempat yang sama tetapi pada saat yang berbeda.

Kemampuan lingkungan untuk mendukung aktifitas manusia dan memulihkan diri sendiri disebut dengan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya berbeda. Beberapa komponen lingkungan dan faktor yang mempengaruhi ikut menetapkan nilai daya dukung lingkungan.

Setiap pabrik pasti memiliki limbah yang bermacam-macam, dan limbah yang dihasilkan pabrik gula sendiri yakni asap yang mengepul keluar dari

cerobong asap yang tersebar di desa sekitar pabrik melalui udara yang sehingga udara tersebut dan tercemar dengan debu hitam yang dihasilkan dari pabrik gula tersebut. Sehingga banyak warga yang merasakan dampak dari tercemarnya udara di lingkungan mereka. Tidak hanya asap saja akan tetapi juga dari bau dan suara dari proses penggilingan dari pabrik gula, akan tetapi yang merasakan dampak tersebut hanya warga yang tempat tinggalnya sangat dekat dengan pabrik.

Limbah pabrik tidak hanya merugikan semata, akan tetapi juga ada manfaatnya. Dari limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik, diolah menjadi *etanol* yang ramah lingkungan sehingga meminimalisir limbah dari pabrik gula. Dari keluhan yang dirasakan warga, pihak pabrik tidak hanya semerta-merta diam saja akan tetapi terus memperbaiki sistem yang beroperasi sehingga dampak yang dihasilkan dari pabrik sedikit demi sedikit berkurang.

Dalam prakteknya, fenomena yang terjadi dalam bidang industri mengancam lingkungan hidup, suatu pencemaran lingkungan yang terjadi di PG Gempolkerep menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam beserta mencari cara penyelesaian pencemaran tersebut. Untuk memahami judul agar lebih jelas, maka penulis mencoba menjabarkan secara lebih detail berdasarkan urutan kata-katanya. Mengenai **“Fenomena Aktivitas Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto dalam perspektif politik lingkungan”**

surat menyurat antara PG Pajajaran dengan *Proefstation Oost Javasuikeerindustrie*, Arsip dari *jaarbook opsuikerfabriekanten op Java*, dan arsip dari buku *Archief Voor Javasuikeerindustrie*, yang diperoleh dari Badan Arsip Jawa Timur, Perpustakaan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan.

Dalam penelitian ini Penelitian ini menemukan fakta bahwa perjalanan industri gula yang pernah Berjaya pada abad ke XVII- hingga abad XVIII mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi malaise hingga pemerintahan Jepang berakhir. Untuk mencapai target produksi yang diharapkan, manajemen pabrik melakukan sejumlah upaya, antara lain: penggunaan bibit unggul, pemakaian mesin yang terbaik, serta dukungan modal yang kuat perusahaan swasta selaku pengelola. PG Meritjan masih mampu bertahan hingga melalui masa Jepang dan revolusi kemerdekaan. Selama masa Jepang, pabrik dibagi menjadi dua, bagian pertama digunakan sebagai pabrik senjata dan bagian kedua digunakan sebagai pabrik gula, sehingga terjadi sejumlah kerusakan pada fasilitas pabrik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Saccharina Putri¹⁰ dengan judul "*Eksistensi Limbah Pabrik Gula di Tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian tentang bagaimana dampak limbah pabrik gula Kanigoro Madiun dan secara tinjauan islam.

¹⁰ Fitria Saccharina Putri, "*Eksistensi Limbah Pabrik Gula Di Tengah Masyarakat Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak limbah Pabrik Gula Kanigoro di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun membawa dampak negatif dan dampak positif.

Dampak negatif yakni limbah cair mengeluarkan bau yang tidak sedap dan limbah udara mengotori lingkungan dan tidak nyaman untuk pernafasan. Dampak positif yaitu limbah cair digunakan setiap tahunnya pada masa giling untuk mengairi sawah-sawah sebagai pengganti air agar tidak gagal panen. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam khususnya Fikih Lingkungan Hidup, keberadaan limbah Pabrik Gula Kanigoro di Kelurahan Banjarejo lebih banyak membawa manfaatnya sehingga sesuai dengan kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup. Manfaat limbah cair dapat menghilangkan kesulitan petani yang membutuhkan air di musim kemarau agar tidak gagal panen sesuai dengan kaidah fikih menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh serta adanya keterkaitan antara bab I dengan bab-bab yang lain, serta untuk mempermudah proses penelitian. Maka akan dipaparkan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

konsep intersubjektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubjektif ini adalah kehidupan-dunia (*life-world*) atau dunia kehidupan sehari-hari.²

Schutz mempertanyakan sifat realitas sosial para sosiolog dan siswa yang hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Dia mencari jawaban dalam kesadaran manusia dan pikirannya. Baginya, tidak ada seorang pun yang membangun realitas dari pengalaman intersubjective yang mereka alami. Kemudian, Schutz bertanya lebih lanjut, apakah dunia sosial berarti untuk setiap orang sebagai aktor atau bahkan berarti baginya sebagai seorang yang mengamati tindakan orang lain? Apa arti dunia sosial untuk aktor/subjek yang diamati, dan apa yang dia maksud dengan tindakannya di dalamnya? Pendekatan semacam ini memiliki implikasi, tidak hanya untuk orang yang kita pelajari, tetapi juga untuk diri kita sendiri yang mempelajari orang lain.³

Instrument yang dijadikan alat penyelidikan oleh Schutz adalah memeriksa kehidupan bathiniah individu yang direfleksikan dalam perilaku sehari-harinya.⁴ Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Apabila kita ingin menganalisis unsur-unsur kesadaran yang terarah menuju serentetan tujuan yang berkaitan dengan proyeksi dirinya. Jadi kehidupan sehari-hari manusia bisa

² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj Alimandan (Jakarta: Kencana, 2007), 94.

³ Ajiboye, Emmanuel Olanrewaju, "Social Phenomenology of Alfred Schutz and the Development of African Sociology", *British Journal of Arts and Social Sciences*, Vol. 04, No. 01, (December, 2012).

⁴ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 233.

refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan.

Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Alfred Schutz memiliki teori yang bertolak belakang dari pandangan Weber. Alfred Schutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.

Pemahaman secara subyektif terhadap tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menajemahkan dan memahaminya serta yang akan beraksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor.

Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subyektifitas yang disebutnya *inter subyektifitas*. Konsep ini merujuk kepada pemisah keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. *Intersubyektifitas* yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung

Yang ke dua yakni makna benda berdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Dan yang terakhir bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu.

1. Unsur pokok dari teori Fenomenologi

Pertama, perhatian terhadap aktor. Persoalan dasar ini menyangkut metodologi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan data tentang tindakan sosial itu subyektif mungkin. Penggunaan metode ini dimaksudkan pula untuk mengurangi pengaruh subyektifitas yang menjadi sumber penyimpangan, bisa dan ketidak tepatan informasi. Menurut pandangan ahli ilmu alam hal seperti itu tidak mungkin dilakukan terhadap obyek studi sosiologi.

Sehingga dapat dikatakan naif kalau ada yang beranggapan bahwa seseorang akan dapat memahami keseluruhan tingkah laku manusia, hanya dengan mengarahkan perhatian kepada tingkah laku yang nampak atau yang muncul secara kongkrit saja. Tantangan bagi ilmuwan sosial adalah untuk memahami makna tindakan aktor yang ditunjukkannya juga kepada dirinya. Bila pengamat menerapkan ukuran-ukurannya sendiri atau teori-teori tentang makna tindakan, dia tidak akan dapat menemukan makna yang sama diantara aktor itu sendiri. Dia tidak akan pernah menemukan bagaimana realita sosial itu diciptakan dan bagaimana tindakan berikutnya akan dilakukan dalam konteks pengertian mereka.

Posisi metodologis Schutz adalah diatur dalam tiga esai dalam Volume 1 dari dikumpulkan karya-karyanya. Titik awal adalah bahwa penelitian sosial berbeda dari penelitian dalam ilmu fisika, berdasarkan fakta bahwa dalam ilmu-ilmu sosial seseorang berhadapan dengan obyek penelitian yang menafsirkan sendiri dunia sosial, yang kita sebagai ilmuwan juga menafsirkan. Orang-orang terlibat dalam suatu proses terus-menerus untuk memahami dunia, dalam interaksi dengan sesama mereka dan kami, sebagai ilmuwan yang berusaha memahami mereka rasa keputusan. Dalam melakukannya, kita harus menggunakan metode yang sama penafsiran seperti halnya orang dalam akal sehat dunianya. Apa yang membedakan perusahaan ilmiah sosial, bagaimanapun adalah bahwa ilmuwan sosial mengasumsikan posisi pengamat tertarik. Dia tidak terlibat dalam kehidupan yang diamati kegiatan mereka bukan kepentingan praktis, tetapi hanya kepentingan kognitif.

Kedua, memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok kepada sikap yang wajar atau alamiah (*natural attitude*). Alasanya adalah bahwa tidak keseluruhan gejala kehidupan sosial mampu diamati. Karena itu perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap sikap yang wajar. Proses terbentuk fakta sosial menjadi pusat perhatian dan jelas bukan bermaksud mempelajari fakta sosial secara langsung. Bedanya terletak pada bahwa sementara paradigma fakta sosial mempelajari fakta sosial sebagai pemaksa terhadap tindakan individu, maka fenomenologi mempelajari bagaimana

Sebagai isu global, masalah lingkungan mendapat perhatian serius dari hampir semua negara di dunia. Sebab problem dan krisis lingkungan tersebar ke setiap negara, meski dengan ragam dan derajat yang berbeda-beda. Seluruh negara di dunia terlihat dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam G7, meskipun sudah agak terlambat, akhirnya mengagendakan isu ini pada pertemuan mereka pada tahun 1989. Ini menandai bahwa persoalan lingkungan yang sebelumnya dianggap berada di lain wilayah *low politics*-isu minor yang menjadi urusan para teknisi tiba-tiba dikaitkan dengan isu-isu sentral politik dunia. Isu lingkungan global menjadi soal ketiga terpenting mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni soal keamanan dan ekonomi.¹¹

Puncak dari semua itu adalah diselenggarakannya konferensi tentang Biodiversity di Rio de Janeiro Brasil tahun 1992 dan hasilnya telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia. Konferensi ini dihadiri oleh 150 negara dan 2500 NGO . KTT Bumi ini juga telah melahirkan kebutuhan akan kode etik dalam memperlakukan lingkungan, sehingga kerusakan bumi tidak menjadi semakin parah. Gagasan ini terefleksi dari pendirian *Bussines Council for Sustainable Development*, yang merupakan wadah para pengusaha di 50 negara anggota untuk mengembangkan sikap moral atau kode etik terhadap lingkungan. Gagasan untuk membiayai berbagai program hijau juga telah

¹¹ Suharko, "Model-model Gerakan NGO Lingkungan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 02, No. 01, (November, 1998), 2.

penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan beberapa masyarakat dan perangkat desa tersebut.

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Peneliti langsung terjun ke lapangan, dengan cara menanyakan terhadap informan pola manajemen limbah yang dilakukan oleh pabrik gula Gempolkrep. Data diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling (Teknik pemilihan Informan). Untuk mendapatkan informasi yang akurat peneliti mengklasifikasikan informan menjadi beberapa mulai dari manager perusahaan, kepala desa, dan masyarakat sekitar pabrik gula Gempolkrep. Dalam penelitian ini menggunakan model wawancara berstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan. Dengan wawancara

Poerwandari 1998) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena:

Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.

Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari. Dengan observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara. Metode observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan di lokasi yang menjadi target penelitian. Untuk penelitian ini lokasi yang akan menjadi obyek penelitian terdapat di Pabrik Gula Gempol Kerep dan desa Gembongan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi ke lapangan yang berlokasi di Desan Gempolkerep, Desa Gembongan, dan PG. Gempolkrep. Dengan melakukan observasi langsung peneliti dapat melihat bagaimana keadaan sekitar yang terjadi antara pabrik dengan masyarakat yang kemudian dijadikan data. Dalam masa observasi peneliti menemukan kesulitan yang ringan sehingga dapat teratasi

Pabrik gula Gempolkrep, salah satu pabrik gula di lingkungan PT. Perkebunan XXI- XXII (Persero) dahulu adalah pabrik gula milik Belanda yaitu Suiker Pabriek Gempolkrep, dengan nama NV. Cultuur Maatschappil Gempolrep milik dari N.V. Kooy A Coster Van Voor Hout yang didirikan tahun 1849. Pada waktu itu banyak pabrik gula di sekitar Mojokerto, antara lain:

- a. Sugar Factory Sentanenlor
- b. Sugar Factory Bangsal
- c. Sugar Factory Brangkal
- d. Surar Factory Tangonan
- e. Sugar Factory Ketanen
- f. Sugar Factory Gempolkrep

Kecuali pabrik gula Gempolkrep pabrik- pabrik tersebut kemudian ditutup, sedangkan sisa aset berupa tanah dan bangunan menjadi milik pabrik gula Gempolmpolkrep. Areal dari pabrik-pabrik tersebut kemudian menjadi areal pabrik gula Gempolkrep sampai sekarang. Pabrik gula Gempolkrep sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lepas dari sejarah BUMN di Indonesia dengan segala perubahan struktur organisasinya.

BUMN di sektor perkebunan sebenarnya sudah lama ada yaitu sesuai ketentuan dalam 1927 No 419 1939 No 445, lahirlah BUMN 113W (Undang-Undang Perusahaan Indonesia) diantaranya *Gouvernements Landbouw Bedrijven* (GLB) yang kemudian beralih menjadi perkebunan negara yang lebih dikenal dengan nama PPN (Lama) Tahun 1957/1958 akibat

konfrontasi Republik Indonesia dengan pemerintahan Belanda dalam rangka pengembalian Irian Barat telah dilakukan tindakan pengambil alihan terhadap maskapai-maskapai belanda yang kemudian dibentuknya Undang-Undang No 8 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan dibentuklah Perusahaan-Perusahaan Negara seperti di sektor perkebunan yaitu PPN baru, sesuai Peraturan Pemerintah No 4/ 1959.

Sesuai dengan keadaan tersebut di atas maka pabrik gula Gempolkrep diserahkan kepada pejabat Indonesia dengan pengawasan penguasa militer saat itu. Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan Perusahaan-Perusahaan Negara dan dengan maksud mensinkronkan berbagai bentuk badan usaha negara telah dikeluarkan Undang Undang No 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Di sektor perkebunan atas dasar UU No 19 tahun 1960 diadakan penggabungan dari perusahaan-perusahaan atau kebun kebun PPN lama (XXIBW) dengan perusahaan-perusahaan atau yang dikelompokkan menurut jenis budaya yang dikelolanya dan yang ditempatkan di bawah koordinasi BPU PPN. BPU-PPN tersebut antara lain:

- a. BPU-PPN karet dengan 17 buah PPN karet
- b. BPU-PPN antan dengan 13 buah PPN antan
- c. BPU-PPN tembakau dengan 10 buah PPN tembakau
- d. BPU-PPN gula dengan 48 buah PPN Gula dan 2 buah PPN karung goni

Pabrik gula menjadi salah satu PPN gula dibawah BPU-PPN gula Pada tahun 1967 dikeluarkan instruksi presiden No 17 Tahun 1967 tentang

pengarahan dan penyederhanan perusahaan negara kedalam tiga bentuk usaha negara (PERJAN, PERUM, PERSERO).

Sesudah instruksi presiden No 17 Tahun 1967 dan sebelum diterbitkan Undang-Undang No 9 Tahun 1999 telah terjadi perubahan (Reorganisasi) secara besar-besaran dalam kelompok PPN-PPN tersebut di atas yakni pembubaran keempat buah BPU-PPN dan pembentukan 28 buah perusahaan negara pekebunan (PNP1S/D28) berdasarkan peraturan pemerintah No. 14 tahun 1966 pabrik gula.

Gempolkrep merupakan salah satu pabrik gula di antara 7 buah pabrik dibawah P.N.P XXII yang wilayah kerjanya meliputi wilayah EX Karisidenan Surabaya Sejak dibentuknya UU No. 9 Tahun 1969 maka mulai tahun 1974 secara berangsur-angsur diadakan pengalihan dan penyesuaian dari 28 PNP ini menjadi bentuk PTP (PERSERO). Diantaranya PNP XXI di wilayah EX Karisidenan Surabaya menjadi PT. Perkebunan XXI-XXII (PERSERO) atas dasar peraturan-peraturan No. 23 Tahun 1973 Tanggal 11 Mei 1973 lembaran Negara RI tahun 1973 No. 29 tambahan berita Negara RI 1974 No. 46 sejak saat itu pabrik gula Gempolkrep menjadi salah satu pabrik di bawah P.T. P XXI/- XXII (PERSERO).

Berdasarkan peraturan pemerintahan No. 15 tanggal 11 Maret 1996, PT. Perkebunan XXI-XXII (PERSERO) dilebur bersama PT. Perkebunan XXVII (PERSERO) menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) di mana pabrik gula Gempolkrep yang terletak di desa Gempolkerep, kecamatan

Gempolkerep. Karena kedua wilayah inilah yang paling merasakan dampak dari proses produksi dan aktivitas pabrik tersebut.

Pemrosesan gula dari tebu yang menghasilkan limbah atau hasil samping di antaranya adalah: ampas, blotong dan tetes. Ampas berasal dari tebu yang digiling dan digunakan sebagai bahan bakar ketel uap. Blotong atau *filter cake* adalah endapan dari nira kotor yang ditapis di *rotary vacuum filter*, sedangkan untuk tetes merupakan sisa sirup terakhir dari masakan yang telah dipisahkan gulanya melalui kristalisasi berulang kali sehingga tidak mungkin lagi menghasilkan kristal.

Satu di antara energi alternatif yang relatif murah ditinjau aspek produksinya dan relatif ramah lingkungannya adalah pengembangan *bioetanol* dari limbah-limbah pertanian (biomassa) yang mengandung banyak *lignocelluloses* seperti bagas (limbah pada industri gula). Di Indonesia sendiri pabrik-pabrik yang memiliki potensi limbah biomassa juga sangat melimpah, termasuk seperti limbah bagas. Industri gula khususnya di luar Jawa juga menghasilkan bagas yang cukup melimpah.

Namun, hal tersebut juga memiliki dampak, seperti debu yang berasal dari proses pembakaran bahan bakar yang jatuh ke rumah warga dan suara bising yang dihasilkan oleh proses produksi serta kendaraan berat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Tulus:

“Selama ini yang masih belum bisa ditangani secara maksimal adalah limbah padat yang dihasilkan oleh proses produksi di Pabrik Gula Gempolkerep berupa abu yang keluar dari cerobong, terutama yang berdekatan dengan pabrik. Kami selaku Wakil Rakyat yang berada di Desa sekitar juga sudah menyampaikan keluhan dari masyarakat kepada pihak pabrik. Dan dari pihak pabrik juga sudah menjanjikan

sekitarnya. Namun kendati demikian, permasalahan tersebut pada akhirnya dapat mereka atasi secara bersama dan tanpa harus adanya aksi yang anarkis.

Sebagaimana yang disampaikan bapak Tulus Wibowo selaku Kepala Desa Gembongan, bahwasanya beliau sudah cukup puas dengan pihak pabrik karena sudah bersedia menerima beberapa keluhan dari masyarakat desanya terkait dengan adanya beberapa dampak kegiatan produksi dan aktivitas di pabrik untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar limbah yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat di sekitarnya.

Namun, terdapat keluhan juga yang disampaikan oleh bapak H. Jani selaku Kepala Desa Gempolkerep terkait dengan kurangnya kesadaran akan program CSR (*Coorporate Social Responsibility*) dari perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampaknya di sekitar pabrik. Di mana seharusnya program CSR yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan tidak harus mendapatkan permohonan terlebih dahulu dari pihak desa. Faktanya yang terjadi justru sebaliknya, walaupun pihak desa telah mengajukan permohonan untuk diadakan program CSR, proses waktu untuk pelaksanaan program tersebut pun masih cukup lama untuk direalisasikan.

Kendati mendapatkan keluhan dari pihak desa, dalam menghadapi isu lingkungan yang terjadi disekitar pabrik Gempolkrep, bapak Agus selaku salah satu Staf di pabrik tersebut menjelaskan bahwa pihak pabrik juga telah memberikan solusi. Beliau mengatakan:

“Isu-isu mengenai lingkungan yang terjadi sejauh ini masih dalam tingkatan bisa teratasi oleh pihak perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, adanya keluhan dari beberapa masyarakat mengenai limbah berupa abu yang keluar melalui

Etika dalam perspektif ini hanya berlaku bagi manusia. Dan segala tuntutan mengenai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup, dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Pola hubungan manusia dan alam hanya dilihat dalam konteks instrumental. Alam dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia. Kepedulian manusia terhadap alam, semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan manusia. Suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup akan dinilai baik apabila mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kepentingan manusia. Hubungan manusia dan alam tersebut bersifat egoistis, karena hanya mengutamakan kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan alam semesta dan makhluk hidup lainnya, tidak menjadi pertimbangan moral.

Paradigma *Antroposentrisme* yang bersifat instrumentalistik dan egoistis tersebut, mendorong manusia untuk mengeksploitasi dan menguras alam demi kepentingannya, tanpa memberi perhatian yang serius bagi kelestarian alam. Kepentingan manusia di sini, sering kali diartikan sebagai kepentingan yang bersifat jangka pendek, sehingga menjadi akar dari berbagai krisis lingkungan. Oleh karena memiliki ciri-ciri tersebut, maka paradigma *Antroposentrisme* dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (*Shallow environmental ethics*).

Dalam perspektif politik lingkungan sebagaimana yang terjadi di PG Gempolkrep, para pembuat kebijakan dalam hal ini pabrik dibawah naungan BUMN yang pasti memiliki pandangan *antroposentrisme* yakni pembangunan sebagai landasan perkuat ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi di sekitarnya. PG Gempolkrep ini termasuk PTPN X yang di dalamnya tidak hanya PG Gempolkrep saja. Di PG Gempolkrep ini hanya melakukan produksi dan proses penggilingan. Dan kantor pusat dari PTPN X ini ada di Surabaya. Jadi semua wewenang dalam kebijakan publik (*public policy*) ini dari kantor pusat yang berada di Surabaya, tidak lepas dari itu juga yang mengetahui kondisi lingkungan sekitar PG Gempolkrep adalah pekerja yang berada di PG Gempolkrep itu sendiri. Dari sini pekerja yang domestik di sekitar pabrik gula juga mendengarkan keluhan masyarakat sehingga dapat disimpulkan bagaimana kebijakan yang harus dibuat sesuai keadaan sekitar. Akan tetapi dari pihak pabrik juga memperhatikan bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga setiap tahun dari pabrik melakukan evaluasi kinerja pengolahan lingkungan. Sesuai data yang penulis dapatkan di PG Gempolkrep.

Tabel 4.1
Evaluasi kinerja pengolahan lingkungan PG Gempolkrep

setiap entitas kehidupan lain di alam semesta. Artinya prinsip yang sama berlaku bagi segala sesuatu yang hidup dan yang memberi serta menjamin kehidupan bagi makhluk hidup. Alam semesta bernilai moral dan harus diperlakukan secara moral, karena telah memberi begitu banyak kehidupan.

Seluruh kehidupan di alam semesta sesungguhnya telah membentuk komunitas moral. Oleh karena itu, setiap kehidupan makhluk apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas pembuangan limbah PG Gempolkrep yang selama ini masih berpotensi bahaya terhadap ancaman lingkungan di sekitar pabrik tersebut dikarenakan paradigma *antroposentrisme* yang masih mendominasi dan masih banyak dianut oleh pabrik selama ini, sehingga menempatkan lingkungan hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan (*shallow ecological movement*). Oleh sebab itu, masyarakat di sekitar pabrik tersebut juga telah sadar akan dampak di masa mendatang bila hal tersebut dibiarkan begitu saja. Maka terjadilah pengajuan permohonan untuk diadakan program CSR. Dari sinilah kemudian paradigma masyarakat berubah menjadi paradigma *biosentrisme*.

Coorporate Social Responsibility (CSR) atau sering diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dewasa ini telah menjadi

suatu hal yang sangat penting dan telah pula diimplementasikan oleh banyak perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan. Pelaksanaan CSR sendiri memainkan peranan yang cukup penting bagi keberlanjutan suatu perusahaan. Kepentingan CSR ini tidak hanya milik perusahaan, tetapi juga pada *Stakeholders*. Dalam hal ini masyarakat Desa Gembongan dan Desa Gempolkerep menjadi aktor lain yang memiliki kepentingan terhadap CSR. Kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraksi sumber daya alam yang telah berdampak bagi berbagai elemen dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pihak perusahaan haruslah segera menanggapi berbagai isu yang beredar di masyarakat dengan mengimplementasikan CSR-nya.

Tidak dapat dipungkiri juga, bahwa pabrik Gula Gempolkerep memang telah mengimplementasikan program CSR-nya sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan misi perseroan terkait dengan usaha menciptakan kondisi ramah lingkungan terhadap masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan dan sistematis. Sebagaimana yang ditegaskan oleh bapak Agus:

“Untuk limbah cair sendiri sebelum dibuang keluar pabrik juga melalui pengolahan terlebih dahulu melalui IPAL. Di area pabrik pun dilakukan penanaman pohon disekitar pengolahan limbah. Diantaranya, Michelia Cempaka (Cempaka), Murraya Paniculata (Kemuning), dan Mimoscrops Elengi (Pohon Tanjung). Pohon tersebut ditanam karena dapat menyerap bau yang dikeluarkan oleh limbah. Diperusahaan kami sendiri juga

proses pencucian dan pemasakan menghasilkan efek asam atau alkali dengan kandungan garam cukup tinggi. Limbah cair ini pun dibuang dan disalurkan ke areal lahan pertanian. Efek negatif limbah cair ini sering dianggap sebagai polutan berbahaya dan mencemari lingkungan. Tidak hanya itu asap yang keluar dari aktivitas pabrik dapat mengganggu pernafasan dan suara mesin penggiling tebu juga dapat merusak pendengaran.

Para pelaku bisnis seringkali mengesampingkan dampak lingkungan dari proses industrialisasi yang mereka lakukan. Hal tersebut selalu dikaitkan dengan paham antroposentris yang memandang bahwa alam dan seisinya merupakan alat untuk menggapai kesejahteraan manusia. Paham ini dinilai sangat instrumentalis dan egoistis.

Kegiatan mengeksploitasi alam dan berdalih itu semua untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya industri dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah, namun peningkatan tersebut sering diikuti dengan dampak lingkungan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa sulit untuk menjadikan industri dan lingkungan seiring dan sejalan. Berdirinya pabrik gula Gempolkrep yang merupakan pabrik peninggalan penjajahan belanda memberikan dampak positif maupun negatif bagi pemerintah dan masyarakat khususnya dengan masyarakat sekitar pabrik gula.

Dalam sektor industri, pengendalian dampak lingkungan limbah industri merupakan masalah yang sangat mendesak agar kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat tidak merosot. Limbah adalah konsekuensi logis dari setiap kegiatan industri. Bila limbah yang mengandung senyawa kimia tertentu sebagaimana berbahaya dan beracun dengan konsentrasi tertentu dilepas ke lingkungan maka hal itu akan mengakibatkan pencemaran, baik di sungai, tanah maupun udara. Sejauh ini pabrik PG Gempolkrep telah berusaha memperbaiki aktifitas pabrik guna mengendalikan pencemaran lingkungan yang akan mengganggu kelestarian atau keseimbangan alam serta masyarakat sekitar.

Dalam setiap perusahaan pasti tidak semua kebijakan yang dikeluarkan atau apa yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitar masyarakat pasti ada suatu pro dan kontra di dalamnya. Dalam hal mengatasi dampak lingkungan yang terjadi di Desa Gempolkerep dan Desa Gembongan ini warga tidak semena-mena dalam melakukan aksi. Masyarakat hanya mengeluhkan apa yang dirasa kepada pejabat desa saja, selebihnya pihak desa yang melaporkan kepada pihak pabrik dalam bentuk surat. Aksi nyata yang berupa demo atau yang serupa lainnya masih belum dilakukan oleh masyarakat karena pencemaran lingkungan oleh pabrik masih dalam skala yang kecil dan masih bisa ditanggulangi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bapak H. Jani selaku kepala Desa Gempolkerep:

Kedua, sedangkan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang kedua tentang isu lingkungan tersebut dalam perspektif politik lingkungan melihat bahwa aktivitas pembuangan limbah PG Gempolkrep yang selama ini masih berpotensi bahaya terhadap ancaman lingkungan di sekitar pabrik tersebut dikarenakan paradigma *antroposentrisme* yang masih mendominasi dan masih banyak dianut oleh pabrik selama ini, sehingga menempatkan lingkungan hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan (*shallow ecological movement*). Oleh sebab itu, masyarakat di sekitar pabrik tersebut juga telah sadar akan dampak di masa mendatang bila hal tersebut dibiarkan begitu saja. Maka terjadilah pengajuan permohonan untuk diadakan program CSR. Dari sinilah kemudian paradigma masyarakat berubah menjadi paradigma *biosentrisme* dan paradigma *ekosentrisme* (*deep ecological movement*), yang lebih menempatkan manusia sebagai makhluk biologis dan ekologis, yang sangat tergantung dengan lingkungan dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta. Sehingga atas dasar kepedulian masyarakat tersebut, pihak pabrik juga telah memberikan bantuan untuk ikut serta dalam menjalankan proyek RPK3 (Rencana Proyek Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan). Di samping itu, pihak pabrik juga telah memberikan bantuan fasilitas berupa air, listrik, dan gula 1 kg per KK setiap kurun waktu tertentu, serta mempekerjakan masyarakat sekitar secara musiman agar mengurangi jumlah masyarakat yang menganggur. Semua kegiatan tersebut sebagai bentuk CSR perusahaan terhadap masyarakat di sekitar lokasi.

